



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
UNIT KERJA : BADAN PENDAPATAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ARI HADIARTA
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK : 472978

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.977.000.000**

1. Tanah Seluas 532 m2 di KAB / KOTA SUMBAWA BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 173 m2/54 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 680.000.000
3. Tanah Seluas 15255 m2 di KAB / KOTA SUMBAWA BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
4. Tanah Seluas 17780 m2 di KAB / KOTA SUMBAWA BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
5. Tanah Seluas 17625 m2 di KAB / KOTA SUMBAWA BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
6. Tanah Seluas 15375 m2 di KAB / KOTA SUMBAWA BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
7. Tanah Seluas 19340 m2 di KAB / KOTA SUMBAWA BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/176 m2 di KAB / KOTA SUMBAWA BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 340.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 610 m2/209 m2 di KAB / KOTA SUMBAWA BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
10. Tanah Seluas 345 m2 di KAB / KOTA SUMBAWA BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 206.200.000

1. MOTOR, YAMAHA MIO MATIC Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 6.200.000
2. MOBIL, TOYOTA ALL NEW RUSH 1,5 MATIC Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 70.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 18.593.708

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 2.271.793.708

III. HUTANG

Rp. 301.043.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.970.750.708

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.